

ABSTRAK

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan, konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum dan solusi kendala tanggungjawab pemilik kendaraan yang mengkomersilkan kendaraannya secara *illegal* saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kanit Laka Lantas dan Penyidik di Polresta Cirebon. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Konstruksi hukum pidana untuk pemilik kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum atau dikomersilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 308 adalah sanksi bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dengan tidak dilengkapi dengan izin menyelenggarakan angkutan orang / tidak memiliki trayek. Konstruksi hukum pidana pertanggungjawaban pemilik kendaraan yang dikomersilkan sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 315 menyebutkan tentang ketika tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum maka pertanggungjawaban pidananya dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya dengan ditambahkan pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasalnya serta dijatuhi pula pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. Kendalanya: tidak terdapatnya Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik kendaraan Mikrobus Elf tersebut sebagai tersangka atau orang yang mempunyai peran ataupun orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengingat jumlah korban yang banyak dan kerugian materiil yang besar. Solusinya berharap adanya pasal tersebut sehingga kedepan bisa membuat efek jera bagi para pemilik kendaraan agar tidak seenaknya mengoperasionalkan kendaraanya tanpa dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan yang ada sesuai dengan undang-undang dan ke depan juga diharapkan bisa mencegah terjadinya korban kecelakaan lalu lintas dalam jumlah banyak.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Angkutan Umum Ilegal, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

Road traffic and transportation have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance public welfare. The formulation of the problem in this research is: construction of criminal law for vehicle owners who are used as public or commercialized transportation, construction of criminal law, the responsibility of vehicle owners who are commercialized as public transportation and solutions to the constraints of responsibility for vehicle owners who commercialize their vehicles illegally when a traffic accident occurs on the road great.

The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. As for the sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with the Head of Laka Lantas and investigators at the Cirebon Police. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively. These problems are studied with criminal liability theory and law enforcement theory.

Based on the results of the research that the criminal law construction for owners of vehicles used as public transportation or commercialized based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 308 is a sanction for everyone who drives a public motorized vehicle without a license to operate. transportation of people / not having a route. The construction of the criminal law on accountability of vehicle owners commercialized as public transportation based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 315 states that when a criminal act is committed by a Public Transportation Company, the criminal liability is imposed on the Public Transportation Company and / or its administrators. with the addition of a fine of a maximum of 3 (three) times the fines stipulated in each article and additional penalties in the form of temporary suspension or revocation of the operating license for the vehicle used are also imposed. Obstacles: absence of Articles in the Traffic Law and Road Transportation Number 22 of 2009 which can be used to ensnare the owner of the Microbus Elf vehicle as a suspect or person who has a role or person who can be held criminally responsible in the traffic accident, wheezing remembering the large number of casualties and the huge material losses. The solution is to hope that this article will exist so that in the future it can create a deterrent effect for vehicle owners so that they do not go around operating their vehicle without being equipped with existing terms and conditions in accordance with the law and in the future it is also expected to prevent the occurrence of traffic accident victims in large numbers.

Keywords: *Responsibility, Illegal Public Transport, Traffic Accidents*